

**PERAN INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION DALAM
MENDORONG INDONESIA UNTUK MELINDUNGI PEKERJA
PLATFORM DIGITAL PADA MASA PANDEMI (2020-2022)**

Oleh : Surya Refaldiansyah

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.Int.Rel

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Digital platform workers, seeking employment or income through applications or websites, have significantly altered the labor market structure with unique characteristics such as flexibility, mobility, and diversity. Despite offering freedom, digital platform workers also face serious challenges, including job uncertainty, discrimination, and a lack of social protection. These conditions have been further exacerbated by the COVID-19 pandemic, impacting digital platform workers across various aspects, ranging from health to economic and social stability. However, there is currently no specific policy regarding the protection of these workers.

This research employed a qualitative method with a case study approach to collect and analyze data from both primary and secondary sources. Primary data is obtained through direct interviews with representatives from ILO Indonesia-Timor Leste, representatives from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, and representatives from Labor Unions affected by the pandemic. Secondary data is sourced from conventions, documents, reports, articles, and other forms of information.

The research shows that the ILO influences the landscape of Indonesia's labor policy regarding the protection of digital platform workers by providing in-depth understanding, advocating for improved social guarantees, and enhancing skills through an inclusive approach. The ILO implements diverse programs and activities, including research, training, workshops, conferences, advocacy, and networking, to raise awareness, build capacity, and engage the Indonesian government in safeguarding digital platform workers during the pandemic. Close collaboration with the government, workers, employers, and other organizations is also a focus of the ILO to develop policies and standards.

Keywords: Protection, digital platform workers, ILO, pandemic, COVID-19, Indonesia, Labour Unions.

PENDAHULUAN

Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia mengalami dampak yang signifikan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Pandemi ini telah meningkatkan permintaan akan layanan platform digital, seiring dengan adopsi gaya hidup *online* yang lebih luas di masyarakat. Hal ini berarti jumlah pekerja yang bekerja melalui platform digital juga meningkat, termasuk pekerja yang berstatus sebagai pekerja informal.¹ Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada perekonomian industri transportasi *online*, *freelancer* serta pekerja platform digital lainnya di Indonesia

Perkembangan teknologi telah menghadirkan perubahan signifikan dalam paradigma dunia kerja, membuka jalan bagi bentuk pekerjaan baru yang disebut pekerja platform digital atau pekerja ekonomi digital. Mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal kerja mereka sendiri, memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka, dan bahkan bekerja dari lokasi mana pun selama terhubung ke internet.

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Laporan Kajian Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia," 2021, accessed August 3, 2023, <https://www.ekon.go.id/source/publikasi/Dampak%20Pandemi%20Covid-19%20terhadap%20Ketenagakerjaan%20Indonesia.pdf>

Fleksibilitas ini adalah salah satu kelebihan utama pekerja platform digital yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dalam kebutuhan dan lingkungan kerja, memanfaatkan teknologi untuk mencapai keberhasilan dan kemudahan dalam pekerjaan. Meskipun memiliki kelebihan tersebut, pekerja platform digital juga menghadapi tantangan seperti kurangnya jaminan pekerjaan dan perlindungan sosial yang seringkali menjadi perhatian dalam ekonomi digital saat ini. Perlindungan terhadap pekerja platform digital sangatlah penting agar terciptanya kesejahteraan dalam aspek sosial, kesehatan dan lainnya.

Pada Pertemuan Regional ILO Asia Pasifik di Singapura, akhir tahun 2022, Direktur Jenderal ILO yaitu Gilbert F. Houngbo menggarisbawahi kerentanan pekerja platform digital yang mencakup ketidakpastian mengenai pekerjaan, seperti jam kerja yang tidak menentu, pendapatan yang tidak sesuai, kesenjangan upah berdasarkan gender, serta kurangnya akses terhadap asuransi kesehatan dan perlindungan hukum.² ILO mendorong para negara anggota agar mengambil kebijakan yang konkret guna memastikan

² International Labour Organization, "Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ke-17 diakhiri dengan peluncuran 'Pernyataan Singapura'," 2022, accessed August 3, 2023, https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_863671/lang-en/index.htm

adanya perlindungan sosial yang memadai.

Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pekerja platform digital, dan hal ini menjadi sebuah tantangan dalam menghadapi perkembangan tenaga kerja digital. Namun, terdapat organisasi internasional, yaitu ILO yang memiliki peran dalam membantu negara-negara untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, termasuk pekerja platform digital.³

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih lanjut peran ILO dalam upaya mendorong hak-hak pekerja platform digital di Indonesia pada masa pandemi COVID-19, dari tahun 2020 hingga 2022. Penelitian ini menganalisis langkah-langkah yang telah diambil oleh ILO, rekomendasi yang diajukan, serta dampak dari masukan dan kebijakan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform digital di Indonesia.

KERANGKA TEORI

Level Analisis Sistem

Menganalisis organisasi internasional di tingkat sistem melibatkan

analisis struktur, fungsi, dan peran organisasi internasional dalam sistem internasional. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan level analisis tingkat sistem, karena ILO sebagai organisasi internasional yang mengatur perlindungan bagi buruh atau pekerja dan dalam hal ini melakukan perlindungan terhadap pekerja platform digital di Indonesia pada masa pandemi.

Menurut Mohtar Mas'ood, level analisis mengacu pada perspektif atau level yang berbeda di mana seseorang dapat menganalisis dan memahami hubungan internasional. Tingkatan ini memberikan cara sistematis untuk mengkaji faktor dan dinamika yang membentuk perilaku negara dan aktor lain dalam sistem internasional.⁴

Pada tingkat sistem, fokusnya adalah pada sistem internasional yang lebih luas dan interaksi antara negara dan aktor lainnya. Organisasi internasional memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku negara dan memfasilitasi kerjasama di antara mereka. Mereka menyediakan wadah bagi negara untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam berbagai isu, seperti keamanan,

³ International Labour Organization, "Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World," 2018, accessed August 3, 2023. https://www.ilo.org/global/topics/digital-labour-platforms/WCMS_645329/lang-en/index.htm.

⁴ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 35-39.

perdagangan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.

Perspektif Konstruktivisme

Penelitian ini mengadopsi konsep dari paradigma konstruktivisme menurut Alexander Wendt, yang menekankan pentingnya identitas peran dalam menjelaskan alasan di balik interaksi kerjasama antara ILO dan pemerintah Indonesia. Alexander Wendt menjelaskan bahwa suatu bentuk kerjasama merupakan suatu bentuk pemahaman terhadap suatu hal yang sama. Persaingan merupakan suatu bentuk ketidakpercayaan terhadap nilai yang sebelumnya telah disepakati.⁵

Menurutnya, konstruktivisme dapat diartikan menjadi pemahaman dalam menentukan *identity*. Kelompok dapat menentukan suatu identitas melalui bentuk kepercayaan terhadap nilai yang sama yang menimbulkan suatu kerjasama.⁶ Suatu identitas terbentuk berdasarkan respon dari seorang aktor yang memutuskan akan bekerjasama ataupun bersaing.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Martha Finnemore, Dalam tulisan yang berjudul "International Organization

As a Teacher; United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization and Science Policy," Martha Finnemore menggunakan analogi ini untuk menjelaskan peran organisasi internasional.

Menurutnya, organisasi internasional berperan sebagai guru yang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai negara dan mengubahnya menjadi ilmu pengetahuan yang dapat menjadi standar bagi negara-negara dalam mengambil tindakan atau sikap tertentu. Dengan kata lain, organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam mendukung negara-negara anggotanya dan mempengaruhi cara mereka berperilaku dalam konteks kerjasama internasional.

Teori Peran Organisasi Internasional

Dalam teori peran yang dikemukakan oleh Clive Archer, norma-norma dalam sistem internasional dapat disebarkan oleh organisasi Internasional melalui berbagai mekanisme yang mencakup penetapan standar, advokasi dan kampanye, pendanaan dan bantuan, kerja sama, serta penyediaan data dan informasi. Pertama,⁷

Organisasi Internasional memiliki peran penting dalam merumuskan standar

⁵ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 39.

⁶ J. Baylis & S. Smith & P. Owens, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (New York: Oxford University Press, 2011), 14..

⁷ Clive Archer, *International Organization* (London: George Allen and Unwin Publisher, 1983), 35.

atau pedoman yang menjadi referensi bagi negara-negara anggotanya. Misalnya, dalam bidang ketenagakerjaan, ILO dapat menyusun pedoman global mengenai perlindungan tenaga kerja yang dianjurkan untuk diadopsi oleh negara-negara. Kedua, Organisasi Internasional sering melakukan advokasi dan kampanye untuk mendorong negara-negara mengikuti norma-norma tertentu. Ini dapat berupa kampanye kesadaran, pemantauan kepatuhan, atau advokasi politik. Ketiga, Organisasi Internasional dapat menggunakan pendanaan dan bantuan sebagai alat untuk mendorong negara-negara mengikuti norma-norma tertentu. Keempat, mereka memfasilitasi kerja sama dan konsultasi antara negara-negara untuk mencapai kesepakatan atas norma-norma yang akan diikuti bersama.

Terakhir, Organisasi internasional memiliki akses terhadap data dan informasi yang relevan dengan norma-norma tertentu, yang dapat mereka bagikan kepada negara-negara anggota untuk mendukung kebijakan yang sesuai dengan norma-norma tersebut. Dengan menggunakan berbagai mekanisme ini, Organisasi Internasional dapat memengaruhi negara-negara anggotanya untuk mengadopsi, mematuhi, dan menyebarkan norma-norma tertentu dalam sistem internasional sesuai dengan peran

dan fungsi yang mereka emban.

Dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional ini, peneliti dapat menganalisis peran ILO secara lebih komprehensif dalam konteks perlindungan pekerja platform digital di Indonesia selama masa pandemi. ILO dapat berperan sebagai instrumen yang digunakan oleh negara-negara anggota dan aktor lainnya, sebagai arena di mana forum dan kesepakatan terbentuk, serta sebagai aktor yang independen dalam melaksanakan tindakan perlindungan.

Organisasi internasional dianggap sebagai aktor independen karena memiliki kekuatan untuk menghasilkan norma-norma baru yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi global, serta memiliki otoritas dan legitimasi untuk menegakkan norma-norma tersebut melalui birokrasi internalnya. Kemampuan teknis yang dimiliki oleh organisasi internasional, seperti sumber daya manusia yang terlatih dan pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu global, memungkinkannya untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dalam berbagai bidang, seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, atau lingkungan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti membuat penelitian yang bersifat deskriptif guna menggambarkan, memahami, menganalisa, dan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dengan cara menggambarkan permasalahan menggunakan kata-kata dan angka serta menjabarkan sebuah persoalan dengan sederhana.

Penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara sebagai data primer. Peneliti telah mewawancarai perwakilan dari ILO yaitu Mr. Abdul Hakim selaku *Programme Officer* ILO, Moderator Hubungan Industrial Ahli Madya, Bapak Arjuna Gempar dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Sekertaris Jendral KSBSI yaitu Bapak Dedi Hardianto dan Deputi Bidang Konsolidasi KSBSI yaitu Bapak Martua Raja Siregar.

Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder berdasarkan analisis dokumen. Metode ini mengharuskan peneliti untuk memeriksa dan menginterpretasikan data dari dokumen-dokumen tersebut untuk mengungkap makna, memahami, dan mengembangkan pengetahuan empiris.⁸

⁸ Glenn A Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no.2 (2009), 27. DOI 10.3316/QRJ0902027.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja

Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Tempat Kerja, diterbitkan oleh ILO, Kementerian Ketenagakerjaan RI, dan IDKI pada Februari 2021, merupakan sebuah panduan komprehensif yang bertujuan memberikan pedoman bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan higienis. Fokus utama pedoman ini adalah mencegah infeksi dan penularan COVID-19 di tempat kerja,

Pedoman COVID-19 yang diterbitkan oleh ILO dan mitra-mitranya ini memberikan panduan dan materi yang jelas untuk mendukung perlindungan pekerja serta mencegah penyebaran virus di tempat kerja. Walaupun demikian, terdapat catatan penting bahwa pedoman ini belum secara khusus membahas perlindungan yang sesuai untuk pekerja platform digital. Isu ini tetap menjadi perhatian utama banyak pihak, mengingat karakteristik pekerjaan platform digital yang unik dan rentan terhadap tantangan kesehatan dan keamanan di tengah pandemi.

Meskipun pedoman tersebut memberikan kerangka dasar yang kuat, kebutuhan akan panduan khusus yang

mengakomodasi keunikan dan dinamika pekerjaan platform digital tetap menjadi suatu kebutuhan mendesak. Perlindungan yang spesifik untuk pekerja platform digital dapat mencakup strategi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan pekerja sendiri untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan keamanan, serta memberikan perlindungan sosial yang memadai.

Dengan adanya pemahaman akan kekurangan ini, diharapkan ILO dan mitra-mitra lainnya dapat terus mengembangkan panduan yang lebih rinci dan relevan untuk pekerja platform digital. Hal ini akan memastikan bahwa upaya perlindungan di tempat kerja selaras dengan evolusi dunia kerja, khususnya di sektor platform digital yang terus berkembang.

Implementasi Strategi dasar ILO dalam mendorong Indonesia melindungi pekerja platform pada masa pandemi

Menurut Abdul Hakim perwakilan dari ILO, kebijakan pemerintah terkait COVID-19 cukup banyak, namun, terkait dengan *digital workers*, belum ada kebijakan yang bersifat khusus. Pemerintah cenderung memandang perlindungan terhadap *digital workers* dari perspektif umum, tidak secara spesifik terfokus pada sektor platform digital. Saat

ini, secara global sedang ada pembahasan terkait pekerja platform digital ini.

“...secara global sekarang kan sedang ada diskusi tentang bagaimana membuat perlindungan untuk pekerja platform secara internasional...” (Wawancara dengan Martua Raja Siregar, Deputi Bidang Konsolidasi KSBSI, 12 Januari 2024).

ILO telah berupaya mendorong pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja platform ini, salah satunya melalui *The Common Implementation Strategy of the ILO* yang merupakan kerangka kerja dan menjadi landasan bagi ILO dalam mendukung pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk mengimplementasikan standar internasional ketenagakerjaan serta mempromosikan agenda kerja yang layak. Strategi ini mencakup tujuh elemen utama, dan ILO telah mengaplikasikan strategi tersebut di Indonesia sewaktu pandemi dengan fokus pada upaya untuk melindungi pekerja platform digital di Indonesia.

Selama masa pandemi yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2020, ILO telah aktif melakukan upaya dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk melindungi pekerja platform digital. ILO melaksanakan beberapa kali pelaksanaan tripartit yang secara khusus membahas isu-isu yang terkait dengan pekerja platform digital. Dalam forum ini, ILO berusaha mempromosikan diskusi dan solusi

konkret guna meningkatkan kondisi kerja dan melindungi hak-hak pekerja dalam era digital.

“...ILO sudah ada melakukan pertemuan-pertemuan unsur tripartit, bicara tentang dampak digitalisasi itu, orang kehilangan pekerjaan, akan ada pengangguran, pengangguran harus disiapkan...” (Wawancara dengan Dedi Hardianto, Sekertaris Jenderal KSBSI, 12 Januari 2024).

Selain itu, ILO juga terlibat dalam penyediaan informasi melalui penerbitan artikel dan bacaan yang relevan dengan isu pekerja platform digital. Langkah ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi pekerja platform digital selama pandemi. Tidak hanya itu, ILO juga turut memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi pekerja platform digital. Bantuan ini dapat berupa saran kebijakan, panduan praktis, pelatihan, atau dukungan teknis untuk implementasi langkah-langkah perlindungan yang lebih efektif. Melalui berbagai inisiatif ini,

ILO berperan sebagai mitra yang aktif dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak pekerja platform digital di tengah tantangan yang dihadapi selama masa pandemi. Terdapat beberapa program yang telah dilakukan ILO Indonesia pada masa pandemi, namun beberapa program bersifat universal terkait

pekerja secara umum yang di dalamnya termasuk juga perlindungan terhadap pekerja platform digital.

“... ILO mengambil peranan penting kalau untuk itu, untuk bagaimana serikat pekerja memahami, pengusaha memahami pemerintah memahami, mendorong bagaimana perlindungan tenaga kerjanya, penegakan hukumnya. ILO mengambil peran-peran itu, dan itu cukup signifikan ILO sebenarnya mereka ada kajian terhadap dampak digitalisasi itu...” (Wawancara dengan Dedi Hardianto, Sekertaris Jenderal KSBSI, 12 Januari 2024).

Analisis Implementasi dorongan ILO Terhadap Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia

Menurut Arjuna Gempar selaku perwakilan Kemnaker, Kemnaker telah melakukan banyak diskusi dengan ILO, yang telah memberikan informasi berharga melalui pengalaman dan kajian mereka terkait pekerja platform digital di seluruh dunia. Informasi yang diterima mencakup pemberlakuan dan ketentuan mengenai pekerja platform digital di berbagai negara, terutama di Amerika dan Eropa, di mana ekosistem pekerja platform digital dianggap sudah berkembang dengan baik. Arjuna menjelaskan bahwa banyak wawasan yang diperoleh dari ILO telah menjadi masukan berharga, terutama terkait regulasi yang secara khusus mengatur pekerja platform digital.

Meskipun belum tercapai kesepakatan atau regulasi konkret melalui kerjasama dengan ILO, Kemnaker telah menginisiasi upaya untuk membuat ketentuan atau peraturan yang secara spesifik mengarah kepada pekerja platform digital. Ia menyampaikan bahwa proses inisiasi regulasi ini mungkin masih berjalan, dan pihak Kemnaker berupaya secara berkelanjutan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin materi terkait persesuaian antara regulasi yang diusulkan dan penerapannya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meminimalkan kesenjangan antara regulasi dan kebutuhan nyata pekerja platform digital, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan yang sesuai dan relevan.

Dalam konteks Indonesia, ILO telah berhasil menjalankan perannya dalam mendorong perlindungan pekerja platform pada masa pandemi COVID-19. Dengan merujuk pada Teori Peran oleh Clive Archer, dapat dipahami bahwa ILO bertindak sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam proses pembentukan kebijakan yang mengarah pada perlindungan pekerja. Sebagai instrumen, ILO berperan sebagai organisasi yang terlibat aktif dalam memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja platform digital. Melalui forum dan pertemuan tripartit,

ILO menyediakan arena bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, untuk berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Selain itu, sebagai aktor yang independen, ILO mendorong pemerintah Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan bagi pekerja platform digital.

Pentingnya peran ILO dalam konteks ini juga dapat dipahami melalui perspektif konstruktivisme menurut Martha Finnemore. Sebagaimana dikemukakan oleh Finnemore, negara dianggap sebagai pembelajar yang menerima masukan, ilmu, dan informasi dari aktor-aktor internasional, seperti ILO, yang berperan sebagai "guru" dalam hal ini. Dalam hal ini, ILO memberikan kontribusi penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan tentang perlunya perlindungan bagi pekerja platform digital di Indonesia.

Selain itu, peran ILO dalam mendorong perlindungan pekerja platform juga sesuai dengan analisis tingkat sistem. ILO dilihat sebagai pemangku kepentingan internasional yang memiliki kapasitas untuk merumuskan kebijakan perlindungan pekerja platform digital tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam konteks global. Dengan demikian,

ILO memainkan peran penting dalam menegakkan standar internasional dan mempromosikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja platform digital di Indonesia dan di seluruh dunia. Melalui peran multifasetnya yang mencakup instrumen, arena, dan aktor, serta dengan mengikuti perspektif konstruktivisme dan analisis tingkat sistem, ILO telah berhasil menjalankan perannya dalam mendorong perlindungan pekerja platform di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

Analisis implementasi dorongan ILO terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pekerja platform digital melibatkan beberapa kriteria yang mencakup aspek standar kerja, keterlibatan pemangku kepentingan, dukungan finansial, dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ILO secara aktif dan strategis berperan dalam mendorong Indonesia untuk melindungi pekerja platform digital selama pandemi. ILO memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan pengakuan terhadap pekerja platform digital sebagai subjek perlindungan sosial.

Selain itu, ILO juga mendorong pengembangan kolaborasi dengan

perusahaan platform digital, mendukung transformasi digital lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, mempromosikan pembayaran upah digital yang bertanggung jawab, membentuk jaringan dan solidaritas antara pekerja platform digital dan organisasi serikat pekerja, serta mendorong ratifikasi dan implementasi konvensi dan rekomendasi ILO yang relevan.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam ekonomi digital, berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa ILO dengan jelas menjalankan atau menerapkan tugasnya sesuai dengan *the Common Implementation Strategy of the ILO* dan *the ILO Centenary Declaration for the Future of Work* yang telah mereka paparkan sebelumnya. Hal ini efektif mendorong pemerintah Indonesia melindungi pekerja platform digital di Indonesia pada masa pandemi.

Penelitian ini mengungkap bahwa ILO, sebagai aktor independen, memiliki kemampuan untuk merumuskan norma-norma global terkait pekerja platform digital dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya melalui pengetahuan mendalam tentang isu-isu terkait serta sumber daya manusia yang terlatih.

ILO telah menjalin berbagai diskusi dengan tripartit-nya dan memberikan masukan melalui beragam kajian. Terbukti, pemerintah Indonesia melalui Kemnaker telah menginisiasi upaya untuk membuat ketentuan atau peraturan secara spesifik yang mengarah kepada pekerja platform digital, dan proses inisiasi ini masih berjalan yang salah satu sumber rujukannya berasal dari masukan-masukan ILO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Archer, Clive. *International Organization*. London: George Allen and Unwin Publisher, 1983.
- Baylis, J & S. Smith & P. Owens.. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press, 2011.
- Mos' oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Wendt, Alexander. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Journal

- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no.2. (2009): 27-40. DOI 10.3316/QRJ0902027

Website

- International Labour Organization. "Digital Labour Platforms and the Future of Work: Towards Decent Work in the Online World." 2018.

Accessed August 3, 2023. https://www.ilo.org/global/topics/digital-labour-platforms/WCMS_645329/lang-en/index.htm.

- _____. "Pertemuan Regional Asia dan Pasifik (APRM) ke-17 diakhiri dengan peluncuran 'Pernyataan Singapura'." 2022. Accessed August 3, 2023. https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_863671/lang-en/index.htm

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. "Laporan Kajian Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia." 2021. Accessed August 3, 2023. <https://www.ekon.go.id/source/publikasi/Dampak%20Pandemi%20Covid-19%20terhadap%20Ketenagakerjaan%20Indonesia.pdf>

Wawancara

- Gempar, Arjuna. Mediator Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan to author. December 23, 2023.
- Hakim, Abdul. Programme Officer ILO to author. December 8, 2023
- Hardianto, Dedi. Sekertaris Jenderal KSBSI to author. January 12, 2024.
- Siregar, Martua Raja. Deputi Bidang Konsolidasi KSBSI to author. January 12, 2024.